

**HASIL SURVEY PERILAKU ANTI KORUPSI PEMERINTAH KOTA BLITAR
TAHUN 2025**

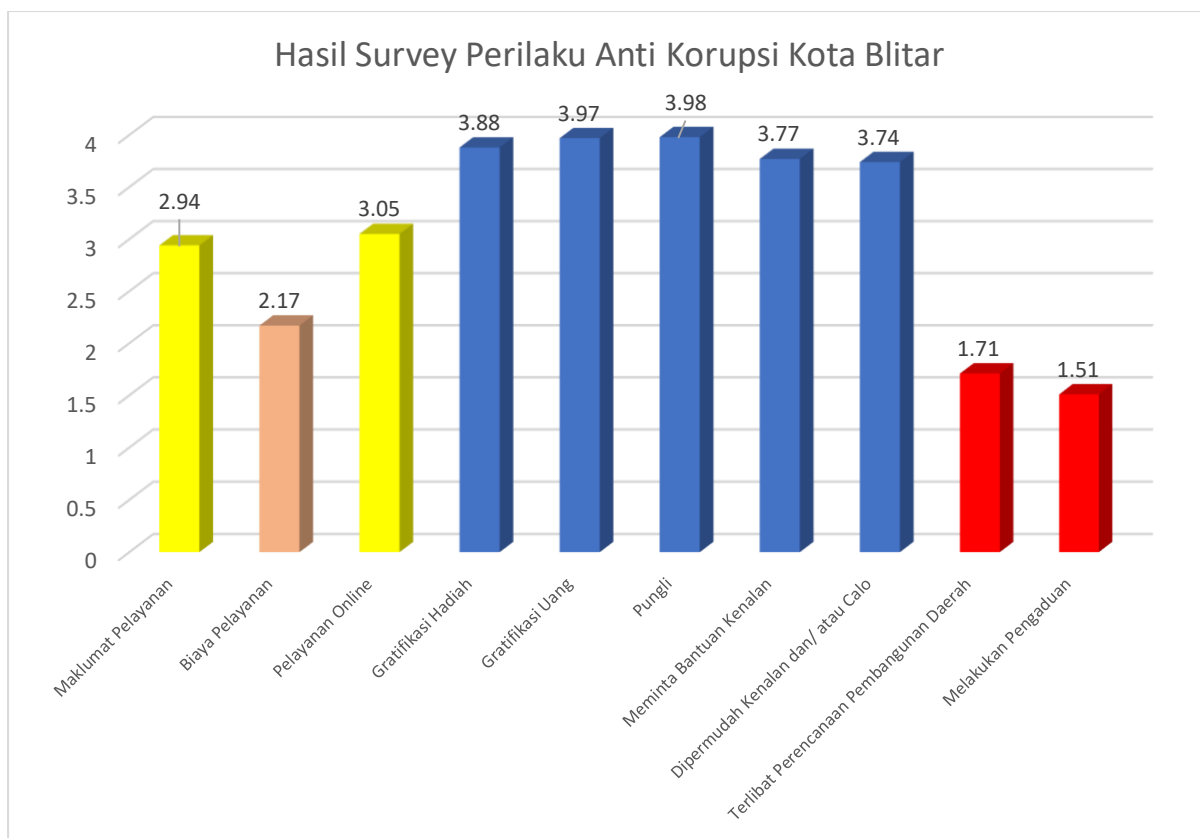
Survey Perilaku Anti Korupsi adalah survey yang dilakukan untuk menilai partisipasi masyarakat dalam hal pemberantasan korupsi di pemerintah daerah. Responden dalam survey ini adalah masyarakat yang pernah mendapatkan pelayanan dan atau pernah berhubungan dengan perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar.

Pelaksanaan Survei ini sebagai tindak lanjut atas ditunjuknya Pemerintah Kota Blitar sebagai salah satu dari 3 (tiga) pemerintah daerah calon Kabupaten/Kota Antikorupsi Tahun 2025 berdasarkan Surat Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor B/393/DKM.01.02/80-84/01/2025. Salah satu kriteria yang harus dipenuhi adalah pelaksanaan Survei Perilaku Anti Korupsi.

Survei ini dilakukan dengan responden masyarakat yang pernah mendapatkan pelayanan atau pernah berhubungan dengan perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar. Kuisisioner survei meliputi aspek transparansi, anti korupsi dan partisipasi. Survey dilaksanakan tanggal 8 s.d. 31 Juli 2025. Pelaksanaan survey memanfaatkan media berbasis digital sehingga memudahkan dalam pengolahan dan pelaporan hasil survey melalui tautan <https://bit.ly/SurveiPerilakuKotaBlitar>. Selama periode tersebut, survey mampu menjangkau 2.134 responden pengguna layanan 30 perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Blitar.

Secara keseluruhan, hasil rekapitulasi nilai rata-rata Survey Perilaku Anti Korupsi Tahun 2025 per kategori pertanyaan adalah sebagai berikut :

No.	Pertanyaan	Nilai Rata-Rata	Kategori
A.	Transparansi	2,72	Waspada
1.	P1 (Maklumat Pelayanan)	2,94	Waspada
2.	P2 (Biaya Pelayanan)	2,17	Rentan
3.	P3 (Pelayanan Online)	3,05	Waspada
B.	Antikorupsi	3,87	Terjaga
4.	P4 (Gratifikasi Hadiah)	3,88	Terjaga
5.	P5 (Gratifikasi Uang)	3,97	Terjaga
6.	P6 (Pungli)	3,98	Terjaga
7.	P7 (Meminta Bantuan Kenalan)	3,77	Terjaga
8.	P8 (Dipermudah Kenalan dan/ atau Calo)	3,74	Terjaga
C.	Partisipasi	1,61	Bahaya
9.	P9 (Terlibat Perencanaan Pembangunan Daerah)	1,71	Bahaya
10.	P10 (Melakukan Pengaduan)	1,51	Bahaya



Sedangkan rata-rata nilai dan kategori masing-masing perangkat daerah adalah sebagai berikut :

Adapun nilai rerata hasil survey terhadap seluruh perangkat daerah adalah sebagai berikut :

NO	PERANGKAT DAERAH	NILAI	KATEGORI
1	Sekretariat Daerah Kota Blitar	2,98	Waspada
2	Inspektorat Daerah Kota Blitar	3,20	Waspada
3	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar	3,40	Terjaga
4	Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar	3,17	Waspada
5	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Blitar	3,14	Waspada
6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Blitar	2,94	Waspada
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar	3,06	Waspada
8	Sekretariat DPRD Kota Blitar	3,24	Waspada
9	RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar	2,97	Waspada
10	Dinas Pendidikan Kota Blitar (termasuk UPTnya)	3,08	Waspada
11	Dinas Kesehatan Kota Blitar (termasuk UPTnya)	2,99	Waspada
12	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar	3,10	Waspada

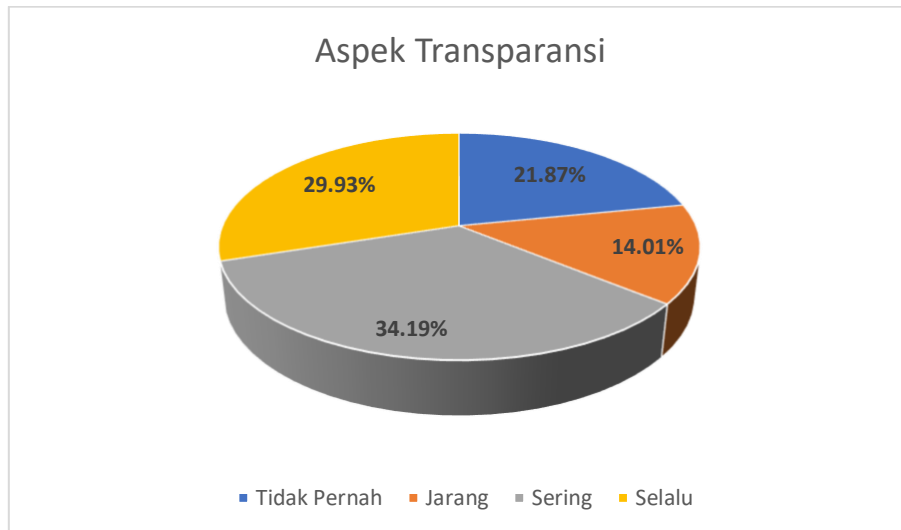
13	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar	3,55	Terjaga
14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Blitar	3,03	Waspada
15	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Blitar	3,10	Waspada
16	Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar	3,05	Waspada
17	Dinas Perhubungan Kota Blitar	2,97	Waspada
18	Dinas Kominfo dan Statistik Kota Blitar	3,29	Terjaga
19	Dinas Sosial Kota Blitar	2,91	Waspada
20	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kota Blitar	3,16	Waspada
21	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar	2,79	Waspada
22	Dinas Koperasi Usaha Kecil, Menengah dan Tenaga Kerja Kota Blitar	3,09	Waspada
23	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar	2,99	Waspada
24	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar	2,97	Waspada
25	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar	3,18	Waspada
26	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar	3,06	Waspada
27	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar	3,10	Waspada
28	Kecamatan Sananwetan Kota Blitar	3,17	Waspada
29	Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar	3,39	Terjaga
30	Kecamatan Sukorejo Kota Blitar	3,16	Waspada
	RATA-RATA	3,11	Waspada

Dari hasil survey dapat disimpulkan bahwa :

1. Rata-rata nilai hasil Survey Perilaku Anti Korupsi Pemerintah Kota Blitar adalah **3,07 dengan kategori Waspada**.
2. Untuk aspek **Transparansi**, yang terdiri dari keterbukaan terkait maklumat pelayanan, biaya pelayanan dan informasi pelayanan *online*, berada dalam kategori **Waspada** dengan rata-rata nilai 2,72. Hal ini menunjukkan Pemerintah Kota Blitar telah melakukan upaya transparansi pelayanan, namun belum dianggap cukup oleh responden, antara lain karena:
 - a. Posisi dan ukuran maklumat pelayanan yang belum langsung dapat terlihat oleh masyarakat.
 - b. Sebagian besar pelayanan di Pemerintah Kota Blitar adalah gratis, namun belum diinformasikan secara jelas dan tegas di tempat pelayanan publik.

- c. Belum semua warga masyarakat Kota Blitar dapat mengakses informasi pelayanan publik secara *online* karena adanya keterbatasan akses, jenis perangkat/gawai, usia dan kebiasaan.

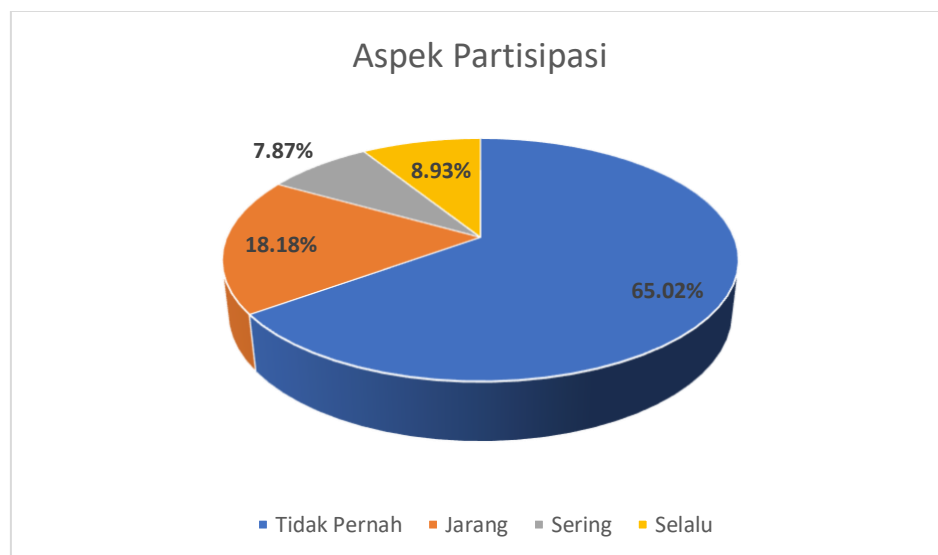
Pertanyaan dengan nilai terendah terkait transparansi adalah informasi terkait biaya pelayanan publik dengan nilai **2,17 (Rentan)**. Hal ini perlu menjadi perhatian bagi seluruh Perangkat Daerah di Pemerintah Kota Blitar karena transparansi atas biaya merupakan salah satu faktor yang dapat meminimalisir adanya pungli dan/atau gratifikasi.



3. Untuk aspek **Anti Korupsi**, yang terdiri dari kecenderungan pemberian gratifikasi barang dan uang kepada petugas pelayanan, adanya pungli dalam pelayanan publik, serta kemudahan dalam menerima layanan dari saudara/ teman/ kolega yang bekerja di Pemerintah Kota Blitar atau jasa perantara/ calo, meskipun skornya berada dalam kategori **Terjaga** dengan rata-rata nilai 3,87, namun data jawaban responden menunjukkan hampir di semua perangkat daerah masih ada yang menjawab “sering” dan “selalu”, meskipun jumlah respondennya relatif kecil. Ini merupakan indikasi bahwa masih terdapat praktek gratifikasi, pungli dan atau percaloan di lingkungan Pemerintah Kota Blitar.



4. Untuk aspek **partisipasi**, yang terdiri dari keterlibatan dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah serta keterlibatan dalam melakukan pengaduan, berada dalam kategori **Bahaya** dengan rata-rata nilai 1,61. Hal ini menunjukkan partisipasi masyarakat Kota Blitar dalam perencanaan pembangunan daerah dan pengaduan secara umum masih rendah. Meski demikian, hal ini belum tentu menunjukkan kondisi yang berbahaya karena:
- Proses perencanaan pembangunan di Kota Blitar sebenarnya telah melibatkan masyarakat, namun hanya perwakilan/tokoh Masyarakat yang dilibatkan, bukan masyarakat secara luas.
 - Masih rendahnya pengaduan. Hal ini dapat disebabkan karena kanal pengaduan belum sepenuhnya dikeyahui keberadaannya oleh masyarakat, Di sisi lain hal ini juga dapat menunjukkan bahwa secara umum masyarakat telah puas terhadap layanan publik yang diberikan oleh Pemerintah Kota Blitar, sehingga sebagian besar responden tidak melakukan pengaduan kepada Pemerintah Kota Blitar.



Hasil Survei Perilaku Anti Korupsi Pemerintah Kota Blitar Tahun 2025 dapat dilihat dengan lengkap melalui tautan [https://drive.google.com/file/d/1y6UQ65PDiBrG9PqilfuBQ-KaMYWCh_qX/view?usp=drive link](https://drive.google.com/file/d/1y6UQ65PDiBrG9PqilfuBQ-KaMYWCh_qX/view?usp=drive_link).